



**PUTUSAN**  
**Nomor 273/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1358/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BANGUN KAYU IRIAN**, beralamat di Jalan Gunung Rinjani Nomor 88 RT/RW 001/004, Sorong Kota, Sorong, Papua Barat, yang diwakili oleh Ari Sutanto, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Karsino, S.H., Ak.M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/BKI-MUC/V/2019, tanggal 8 Mei 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118640.16/2011/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 273/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, yaitu:

Formal;

Membatalkan demi hukum SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00003/207/11/951/16 tanggal 11 Agustus 2016 dan Keputusan Keberatan Nomor KEP-00023/KEB/WPJ.18/2017 tanggal 14 September 2017 dan menyatakan bahwa SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Materiil;

Menyatakan bahwa nilai Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan menjadi 0 (Nihil). Begitu pula, Kelebihan Pajak yang Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya menjadi 0 (Nihil), sehingga perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi 0 (Nihil), dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Terbanding (Rp)	Pemohon Banding (Rp)
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	0	0
Dikurangi:		
Pajak Masukan yg Dapat Diperhitungkan	3.036.954.022	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(3.036.954.022)	0
Kelebihan Pajak yg Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	6.519.623.225	0
PPN kurang dibayar	3.482.669.203	0
Sanksi Administrasi	3.482.669.203	0
Jumlah PPN yg Harus dibayar	6.965.338.406	0

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118640.16/2011/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

## Mengadili

Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00023/KEB/WPJ.18/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor: 00003/207/11/951/16 tanggal 11 Agustus 2016, atas nama: PT Bangun Kayu Irian, NPWP 01.375.144.1-951.001, beralamat di Jl. Gunung Rinjani Nomor.88 RT 001, RW 004, Sorong Kota, Sorong, Papua Barat, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2011 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah
a. Dasar Pengenaan Pajak	-
b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	-
c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	6.519.623.225
d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar	(6.519.623.225)
e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	6.519.623.225
f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar	-
g. Sanksi Administrasi	-
h. Jumlah PPN yang kurang / (lebih) bayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 273/B/PK/Pjk/2020



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118640.16/2011/PP/M.XVIB Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118640.16/2011/PP/M.XVIB Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00023/KEB/WPJ.18/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00003/207/11/951/16 Tanggal 11 Agustus 2016, atas nama: PT. Bangun Kayu Irian, NPWP 01.375.144.1-951.001, beralamat di Jl. Gunung Rinjani Nomor 88 RT. 001, RW. 004, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00023/KEB/WPJ.18/2017 tanggal 14 September 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor: 00003/207/11/951/16 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.375.144.1-951.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu sengketa formal mengenai penerbitan SKPKB yang sudah melewati Daluwarsa penerbitan Ketetapan Pajak dimana SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2011 Nomor: 00003/207/11/951/16 diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2016, sedangkan sengketa material mengenai Koreksi Pajak Masukan Masa pajak Juli 2011 sebesar Rp.3.482.669.203,00 berdasarkan Pasal 16 B ayat (3) UU PPN yang tidak dipertahankan



Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa sengketa formal mengenai penerbitan SKPKB yang sudah melewati Daluwarsa penerbitan Ketetapan Pajak dimana SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2011 Nomor: 00003/207/11/951/16 diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2016, sedangkan sengketa material mengenai Koreksi Pajak Masukan Masa pajak Juli 2011 sebesar Rp3.482.669.203,00 berdasarkan Pasal 16 B ayat (3) UU PPN yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena penerbitan obyek sengketa telah melampaui masa daluwarsa penerbitan SKP dan Majelis Hakim Agung berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *in litis* harus dibatalkan dan tidak memiliki sifat *erga omnes* dan olehkarena itu koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 273/B/PK/Pjk/2020





Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
*juncto* Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	-
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	-
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	6.519.623.225
Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar	Rp	(6.519.623.225)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	6.519.623.225
Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar	Rp	-
Sanksi Administrasi	Rp	-
Jumlah PPN yang kurang / (lebih) bayar	Rp	-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 273/B/PK/Pjk/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 273/B/PK/Pjk/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 273/B/PK/Pjk/2020